



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PANITIA PUSAT REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

GEDUNG DJUANDA I JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21  
TELEPON (021) 381-2727; FAKSIMILI (021) 381-2727, 345-4319, SITUS [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

**PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG-01/PHPP/2020**

TENTANG

**REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Dalam rangka mengisi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2020 mengundang putra dan putri terbaik bangsa di seluruh Indonesia yang ingin mengabdikan kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada **Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN**

**UMUM:**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun per tanggal pendaftaran;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
6. Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanaan dan cukai sekurang-kurangnya 15 tahun;
7. Berwibawa, jujur, adil, berintegritas, dan berkelakuan tidak tercela;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
9. Sehat jasmani dan rohani.

**KHUSUS:**

1. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1);
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Tertib membayar pajak dibuktikan dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh Perorangan 2 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang wajib sesuai ketentuan;
5. Memiliki motivasi dan integritas tinggi; dan
6. Bagi Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**B. KETENTUAN PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran dilaksanakan secara *on-line* melalui laman [www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id](http://www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id) mulai tanggal 18 September s.d. 14 Oktober 2020.
2. Pada saat pendaftaran *on-line*, peserta harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *on-line* serta mengunggah (*upload*) *softfile* berkas berjenis PDF *file* dengan ukuran masing-masing maksimal 5 Mb (*megabyte*) sebagai berikut:
  - a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh peserta dan ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan menyatakan pilihan untuk menjadi Hakim di bidang pajak atau hakim di bidang kepabeanaan dan cukai;

- b. Daftar Riwayat Hidup dengan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman [www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id](http://www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id));
  - c. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna biru ukuran 4x6;
  - d. Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Pasca Sarjana (S2) dan/atau Doktor (S3) yang telah dilegalisir;
  - e. Ijazah/Sertifikat pendidikan keahlian di bidang Perpajakan atau Kepabeanaan dan Cukai (jika ada);
  - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) setempat;
  - h. Surat Pernyataan tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan dibubuhi meterai Rp.6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman [www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id](http://www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id));
  - i. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan Tahun 2018 dan 2019;
  - j. Surat Kuasa kepada Panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan Tahun 2018 dan 2019 dengan dibubuhi meterai Rp.6.000,- sesuai format terlampir (dapat diunduh di laman [www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id](http://www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id)); dan
  - k. Tanda terima/bukti kirim LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang diwajibkan.
3. Dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Eselon I atau pejabat yang berwenang bagi peserta yang berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif (dapat diunduh di laman [www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id](http://www.rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id)); dan
  - b. Surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan negeri;
- harus dibawa pada saat pelaksanaan Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan *Paper*.

### C. TAHAPAN REKRUTMEN

Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dengan tahapan yang meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Tes Pengetahuan Perpajakan dan Penulisan *Paper*;
3. Tes Kesehatan; dan
4. Wawancara, meliputi pendalaman terhadap hasil *Assessment Center*; penelusuran rekam jejak, serta penerimaan masukan dari masyarakat.

### D. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses rekrutmen sampai dengan pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.
2. Dalam rangka rekrutmen calon Hakim Pengadilan Pajak, Panitia Pusat tidak memungut biaya apapun.
3. Semua keputusan Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Jakarta, 16 September 2020  
Sekretaris Jenderal  
selaku Ketua,

Ttd.

Hadiyanto